

ADVOKASI HAM PEOPLE WITH ALBANISM (PWA) OLEH UNDER THE SAME SUN (UTSS) DI TANZANIA TAHUN 2010-2015

HUMAN RIGHT OF PEOPLE WITH ALBANISM (PWA) ADVOCACY
BY UNDER THE SAME SUN (UTSS) IN TANZANIA 2010-2015

Salsabilla Siti Alifka¹, Rachmayani²

¹IISIP Jakarta, Jl. Raya Lenteng Agung 32, Jakarta Selatan, 12610, Indonesia

²IISIP Jakarta, Jl. Raya Lenteng Agung 32, Jakarta Selatan, 12610, Indonesia

Email: ¹ salzabillasitalifka@gmail.com, Email: ² rachmayani@ymail.com

Abstrak

Tulisan ini menganalisis isu pelanggaran Hak Asasi Manusia dan peranan aktor non-negara dalam memperjuangkan HAM. Unit analisis penelitian ini adalah *Under the Same Sun* (UTSS). Ditemukan bahwa UTSS menunjukkan upaya nyata dalam menangani kasus pelanggaran HAM yang menimpa orang-orang PWA di Tanzania, negara di kawasan Afrika Timur. Upaya perjuangan UTSS dilakukan dalam kerangka advokasi transnasional, mendekati aktor lain yang memiliki legalitas lebih kuat, yaitu organisasi PBB. Dalam pelanggaran HAM PWA terdapat indikasi keterlibatan elit-elit politik dan bisnis Tanzania baik secara langsung ataupun tidak langsung, berkaitan erat dengan sistem kepercayaan dan kebudayaan yang melekat di Tanzania. Strategi advokasi UTSS yaitu melakukan kampanye global, dengan target utama masyarakat internasional dan Organisasi Internasional PBB. Hasil perjuangan advokasi PWA oleh UTSS di Tanzania tahun 2010-2015 menunjukkan signifikansi peranan organisasi internasional *non-state* dalam memperjuangkan isu HAM secara global. UTSS berhasil mendorong PBB sebagai organisasi internasional paling *legitimate*, dengan beberapa kebijakan global untuk mendukung HAM PWA di dunia. Hal ini menunjukkan efektifitas jaringan advokasi yang dibangun UTSS secara global.

Kata Kunci : advokasi, kampanye global, Tanzania, UTSS

Abstract

This paper analyzes the issue of human rights violations and the role of non-state actors in fighting for human rights. The unit of analysis of this research is Under the Same Sun (UTSS). It was found that UTSS shows real efforts in handling cases of human rights violations that befall PWA people in Tanzania, a country in the East African region. The UTSS struggle is carried out within a transnational advocacy framework, approaching other actors who have stronger legality, namely the United Nations organization. In PWA human rights violations there are indications that the involvement of Tanzania's political and business elites, directly or indirectly, is closely related to the belief system and culture inherent in Tanzania. UTSS advocacy strategy is to conduct a global campaign, with the main target of international communities and the United Nations International Organization. The results of the PWA advocacy struggle by UTSS in Tanzania in 2010-2015 showed the significance of the role of international non-state organizations in fighting for human rights issues globally. UTSS has succeeded in pushing the UN as the most legitimate international organization, with several global policies to support PWA human rights in the world. This shows the effectiveness of the advocacy network developed by UTSS globally.

Keywords: *advocacy, global Campaign, Tanzania, UTSS*

PEDAHULUAN

Pasca perang dingin, dunia menghadapi perubahan yang signifikan terkait isu atau permasalahan internasional, yang tidak lagi terfokus pada masalah perang atau keamanan suatu negara, tetapi beralih ke isu yang bersifat non-tradisional seperti masalah lingkungan global, HAM, demokrasi, kesetaraan gender, menjadi bahasan di arena internasional. Era globalisasi saat ini menggeser *concern* negara dan institusi internasional dari isu konvensional ke isu non-tradisional. Upaya mencari solusi atau jalan keluar untuk menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut semakin gencar. HAM merupakan salah satu masalah global yang menarik perhatian dunia internasional. Secara global, HAM telah memiliki berbagai instrument pengakuan dan perlindungan yang secara legal mengatur negara agar patuh dalam menghormati dan memenuhi HAM masyarakatnya. Namun, kenyataannya masih sering terjadi berbagai isu pelanggaran HAM di berbagai negara di dunia. Pelanggaran terhadap HAM bisa terjadi di setiap negara, dan menjadi suatu masalah tatkala negara tidak dapat melindungi hak-hak masyarakatnya.

Tanzania merupakan negara bagian Afrika Timur, menjadi salah satu negara yang dianggap melanggar HAM dan tidak dapat melindungi ratusan warganya yang mendapat perlakuan kejahatan terhadap kemanusiaan atau yang biasa disebut dengan *crimes against humanity*. Pelanggaran HAM yang terjadi di Tanzania menasar sekelompok minoritas yang secara fisik memiliki perbedaan dengan manusia pada umumnya, dikenal sebagai Albino (Albinisme) atau People with Albanism (PWA). Albino merupakan kelainan keturunan yang ditandai dengan berkurangnya produksi melanin (pigmen yang memberi warna pada kulit, rambut, dan mata) sepenuhnya atau sebagian. Alhasil, orang dengan Albinisme atau yang sering disebut dengan Albino memiliki kulit, rambut, dan mata dengan warna yang terang, apalagi mayoritas masyarakat Tanzani berkulit gelap (hitam) sehingga perbedaan tersebut menjadi sangat kontras/mencolok.

Di antara negara-negara Afrika lainnya,

Tanzania memiliki catatan kejahatan serangan dan pembunuhan terhadap PWA paling tinggi, yakni berjumlah 139 orang, mulai dari korban meninggal, survival (yang masih hidup), hingga perampokan jasad di kuburan. Orang-orang albino di Tanzania tidak hanya mengalami tindakan kejahatan dan kekerasan. Mereka juga mendapatkan perlakuan diskriminatif oleh masyarakat setempat karena fisiknya yang berbeda dari orang Afrika pada umumnya. Diskriminasi terhadap PWA yang ada di Afrika khususnya di Tanzania, membuat mereka menderita keterasingan atas stigma sosial dalam suatu komunitas, tetangga setempat, bahkan kerabat mereka yang percaya bahwa mereka adalah hantu atau orang yang terkutuk (Magembe, 2015). Maraknya penyerangan dan pembunuhan terhadap PWA berkaitan erat dengan adanya kepercayaan yang sudah ada sejak zaman dahulu. Data dari kementerian luar negeri RI menyebutkan bahwa agama yang dianut masyarakat Tanzania terbagi atas 3 kepercayaan, yaitu 35% kepercayaan nenek moyang; 35% Islam; 30% Kristen. Namun sebagian besar masyarakat Tanzania mempercayai mitos yang beredar dan bahkan dijadikan pedoman hidup yang dalam kesehariannya. Maka, tidak heran jika mitos yang ada di lingkungan masyarakat Tanzania sangatlah kuat, apapun latar belakang agama dan kepercayaan mereka (Kementerian Luar Negeri RI, 2019).

Masyarakat Tanzania memiliki kesadaran yang bisa dibilang masih sangat rendah terhadap pengetahuan mengenai Albino. Akibatnya, keberadaan orang PWA sering dihubungkan sebagai penyebab rendahnya kondisi ekonomi masyarakat dan tingginya angka kemiskinan di Tanzania. Mitos yang beredar mengatakan bahwa PWA merupakan sebuah kutukan. Faktanya Tanzania merupakan salah satu dari 10 negara paling miskin di dunia, 70% populasinya hidup di bawah garis kemiskinan dan 80% hidup di daerah pedesaan. Masyarakat pedesaan tersebut menggantungkan hidupnya pada sektor agrikultur (pertanian) yang kurang bisa berkembang. Dampak ketidakstabilan ekonomi masyarakat Tanzania, banyak penduduk pedesaan tidak

dapat mengakses pendidikan dan informasi. Justru dengan kondisi minimnya pendidikan tersebut mengakibatkan pemahaman masyarakat terhadap suatu hal menjadi tidak jelas, sehingga mereka pun sulit memahami Albino dengan baik (Masanja, Awareness, Attitude and Level of Albino's Predicament in Tanzania, 2014). Selain itu, rendahnya pengetahuan masyarakat Tanzania juga diiringi dengan kepercayaan atau mitos dan budaya setempat di Tanzania. Bagian tubuh orang-orang Albino digunakan oleh para dukun sebagai ramuan sakti yang dianggap akan membawa kekuatan. Sulitnya akses informasi yang masuk di daerah Tanzania menyebabkan maraknya para dukun menyebarkan kebohongan, hal ini yang akhirnya menjadi hambatan utama dalam menangani tindakan kejahatan tersebut (National Geographic, 2015).

Dengan adanya kasus kekerasan terhadap PWA ini, perlu ditinjau lebih dalam oleh Pemerintah Tanzania, negara-negara tetangga, serta organisasi baik regional dan internasional yang menaungi masalah 'humanity' atau kemanusiaan. Sebagai negara miskin yang masih bergelut dalam memberantas kemiskinan dan mencapai stabilitas ekonomi maupun politik, sulit diharapkan Tanzania berperan aktif dalam menyelesaikan isu pelanggaran HAM PWA, terlebih permasalahan ini berkaitan erat dengan mitos dan kepercayaan masyarakat setempat yang telah terjadi puluhan tahun lamanya. Selain itu, pelaku dari tindak kejahatan dan pelanggaran HAM tersebut bukan hanya masyarakat biasa atau dukun yang memanfaatkan situasi, namun beberapa tokoh politik dan bisnis di Tanzania ikut andil sebagai pelaku karena pengaruh kuat mitos yang beredar. Oleh karena itu, sebuah organisasi internasional *non-state* yang bergerak di bidang HAM mengambil peran dalam upaya memperjuangkan HAM PWA di Afrika, terutama di Tanzania. Under The Same Sun pertama kali berdiri di Canada tahun 2008, organisasi ini memiliki misi untuk melindungi HAM orang-orang albino di seluruh dunia dari segala bentuk tindakan marginalisasi dan diskriminasi. Di Tanzania sendiri, UTSS membuka kantor cabang pada tahun 2009, sejak saat itu mereka mulai

bergerak memperjuangkan HAM PWA.

Sebenarnya pemerintah Tanzania telah melakukan beberapa tindakan untuk melindungi hak asasi manusia PWA, seperti melakukan sensus untuk mengetahui jumlah PWA di Tanzania, lalu memberikan bantuan telepon genggam kepada para PWA untuk digunakan ketika mereka berada dalam bahaya. Namun upaya pemerintah tersebut belum memadai untuk melindungi hak orang-orang albino, terutama dari berbagai tindakan diskriminasi oleh masyarakat luas. Tindakan kejahatan dan kriminalitas terhadap PWA pun belum mampu diselesaikan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, sulit mengharapkan pemerintah Tanzania untuk bekerja secara maksimal dalam melindungi HAM PWA di negaranya. Masuknya UTSS ke negara Tanzania sejak tahun 2009 untuk memperjuangkan hak orang-orang albino memperlihatkan peran penting sebuah organisasi internasional yang bekerja berdasarkan nilai yang mereka anut, tanpa dipengaruhi oleh kepentingan politik manapun.

Dari uraian latar belakang di atas penulis akan mengkaji lebih jauh beberapa persoalan. Bagaimana upaya UTSS dalam menyebarluaskan isu pelanggaran HAM yang menimpa PWA di Tanzania? Apa saja dan bagaimana UTSS mengatasi masalah HAM PWA? Bagaimana strategi untuk mengadvokasi PWA sebagai korban pelanggaran HAM?

Pengamatan dilakukan terhadap kegiatan UTSS mengadvokasi PWA di Tanzania periode waktu 2010-2015. Penelitian ini menggunakan pendekatan Liberalisme institusional dalam studi Hubungan Internasional, sebagai salah satu aliran dari teori liberalisme yang mengutamakan kebebasan individual. Teori Liberalisme institusional menjelaskan bahwa negara bukan satu-satunya aktor dalam hubungan internasional, di mana ada aktor lain yaitu institusi internasional baik yang bersifat *state* ataupun *non-state*. Menurut Keohane, dalam paham liberalisme institusional, institusi atau organisasi internasional dianggap dapat memajukan kerjasama di antara negara-negara. Institusi ada untuk mengurangi masalah yang berkenaan dengan ketidakpercayaan antarnegara,

dan mengurangi ketakutan satu Negara dengan negara lain yang dianggap menjadi masalah tradisional yang dapat berkaitan dengan anarki internasional (Jackson and Sorensen, 2016). Eksisnya kaum liberal ditunjukkan dengan kemunculan banyaknya perusahaan-perusahaan multinasional (MNCs), NGOs (LSM) serta beberapa kelompok orang yang bekerjasama mempengaruhi pemikiran suatu pemerintahan atau pihak berwenang agar tujuan yang mereka inginkan dapat tercapai. Hal ini menjadi bukti bahwa negara tidak lagi menjadi satu-satunya aktor penting dalam hubungan internasional (Pettiford, 2009).

Dalam penelitian ini, liberalisme institusional yang dimaksud berkaitan dengan peran aktor non-negara seperti organisasi internasional yang dapat mengurangi masalah dan efek dari pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Tanzania. UTSS sebagai INGOs, lebih spesifik sebagai INGO advokasi yang berupaya menangani masalah pelanggaran HAM PWA, berupaya memaksimalkan perannya sebagai organisasi internasional yang berfokus melindungi hak-hak PWA sebagai kelompok minoritas, yang seringkali mengalami diskriminasi dan kekerasan di berbagai negara di dunia, terutama di wilayah Afrika. Selanjutnya konsep yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, konsep advokasi dengan strategi persuasi dan *Global Campaign*. Jaringan advokasi dibangun untuk mencapai kepentingan yang dianggap akan merepresentasikan kepentingan publik yang lebih luas dengan aktor utamanya yaitu organisasi internasional non pemerintah (INGOs). Pengertian advokasi adalah serangkaian aksi-aksi atau tindakan yang sesuai rencana dan didesain untuk membujuk serta mempengaruhi pemegang kekuasaan pemerintahan, politik, dan ekonomi (Bhose, 2003). Namun, dalam praktiknya, advokasi juga ditujukan terhadap publik guna menciptakan kesadaran pada publik dan meningkatkan pengaruh kepada pembuat kebijakan (Africa, Super For Analysis and Research in, 2016). Dalam melakukan advokasi, INGO menggunakan strategi kampanye global, yaitu strategi membangun kesadaran masyarakat

internasional terhadap suatu isu agar isu tersebut mendapat perhatian, sehingga mempengaruhi pandangan dan dukungan dari masyarakat global tersebut, *global campaign* juga dilakukan lewat keterlibatan aktif INGOs dalam berbagai dialog di forum-forum internasional.

Literature review yang digunakan dalam penelitian ini pertama tulisan dari Benson A. Mulemi dan Urbanus M. Ndolo yang berjudul “*Albinism, Witchcraft, and Superstition In East Africa : Explorating of Bio-Cultural Exclusion and Livelihood Vulnerability*”. Tulisan ini menjelaskan sejarah dan latar belakang mengenai diskriminasi dan pelanggaran HAM yang dialami oleh PWA di Afrika Timur, Tanzania. Pelanggaran HAM ini secara budaya telah memengaruhi sikap dan perilaku masyarakat Tanzania terhadap PWA dan meningkat dari tahun ke tahun. Penelitian selanjutnya, skripsi Budi Irdiyawan, Universitas Andalas berjudul *program advocacy and public awareness* oleh UTSS sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia orang-orang dengan albinisme di Tanzania. Ia menggunakan konsep *human rights* NGO dan advokasi, yang menjelaskan bagaimana UTSS dalam memperjuangkan hak PWA, menghapus ketidaksetaraan, serta menyadarkan masyarakat luas agar pandangan orang-orang terhadap PWA menjadi lebih baik (Budi Irdiyawan, 2017). Tulisan pertama lebih kepada aspek sejarah dan budaya yang menjelaskan terjadinya diskriminasi terhadap PWA di wilayah Afrika Timur, termasuk Tanzania. Tulisan ini tidak menjelaskan tentang penyelesaian dari masalah diskriminasi yang dialami oleh PWA, hanya sebatas memberikan data dan fakta mengenai kondisi marginalisasi yang dialami oleh PWA. Sedangkan tulisan kedua fokus kepada upaya advokasi yang dilakukan oleh aktor non-state UTSS dengan targetnya memperjuangkan hak PWA dan membangun kesadaran masyarakat luas agar mengubah pandangan atau paradigma mereka yang cenderung buruk terhadap PWA. Penulis meneliti lebih jauh mengenai advokasi PWA oleh UTSS, dengan target organisasi internasional yaitu PBB. Sebagai organisasi internasional paling *legitimate* saat ini, PBB

Tabel 1. Mitos umum tentang PWA (People With Albinism) di Tanzania

NO	MITOS
1	Albinisme adalah kutukan dari para dewa atau dari leluhur yang sudah mati. Akibatnya, kontak dengan PWA akan membawa nasib buruk, penyakit, atau bahkan kematian.
2	Orang dengan albinisme tidak pernah mati. Mereka bukan manusia, mereka adalah hantu.
3	Kesalahan ibu jika seorang anak memiliki albinisme.
4	Berhubungan seks dengan seorang wanita dengan albinisme akan menyembuhkan AIDS.
5	PWA memiliki penglihatan normal.
6	Ramuan yang dibuat dari bagian tubuh PWA memiliki kekuatan magis membawa kekayaan, kesuksesan, dan keberuntungan bagi pemiliknya.
7	PWA berasal dan hanya hidup di Tanzania.

Sumber: *NGO REPORT of UNDER THE SAME SUN (UTSS)*

diharapkan mampu mengeluarkan kebijakan yang dapat mengangkat harkat dan martabat PWA di seluruh dunia, serta melindungi HAM PWA secara global. Hal inilah yang dilakukan oleh UTSS, berjuang untuk mengadvokasi hak PWA dengan membangun jaringan dengan actor lain yang lebih kuat, dengan melakukan persuasi untuk mencapai target yang diinginkan. Di sisi lain UTSS tetap aktif mengadvokasi PWA dengan target masyarakat luas di Tanzania maupun di seluruh dunia untuk membangun kesadaran akan keberadaan PWA yang haknya sama dengan manusia lainnya. Di Tanzania sendiri masalah pelanggaran HAM PWA sudah dapat dikategorikan sebagai tindak kejahatan terhadap kemanusiaan di mana diskriminasi yang menimpa PWA kemudian tereskalasi menjadi tindak kejahatan yang menghilangkan nyawa orang albino. Oleh karena itu, menjadi penting untuk mengangkat isu ini, terutama dalam perspektif HAM, yang memandang sama semua manusia di dunia, apapun warna kulit dan kondisi biologis mereka. Upaya advokasi yang dilakukan oleh UTSS secara global akan menentukan bagaimana nasib PWA sebagai kelompok minoritas dan marginal di seluruh dunia nantinya, khususnya di Tanzania.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang dimaksudkan untuk memahami advokasi UTSS dalam upayanya menyelesaikan kasus pelanggaran HAM PWA di Tanzania tahun 2010 -2015 secara mendalam

dan komprehensif yang kemudian dianalisa menggunakan perspektif dalam Studi Hubungan Internasional. Pendekatan kualitatif digunakan bukan sekadar mendapatkan data, melainkan juga makna yang terdapat dan tergambaran dari data-data yang ada sehingga didapatkan pemahaman yang mendalam, serta landasan yang jelas kepada penulis untuk melakukan penelitian.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sekunder yaitu studi literature dan pengumpulan data primer yaitu wawancara. Studi literature dilakukan untuk mengumpulkan data pustaka, mengambil makna dan memperoleh pemahaman. Menurut Sugiyono (2007), literatur merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental seseorang. Dahulu studi literatur dalam penelitian masih kurang diperhatikan, namun dengan kesadaran dan pemahaman baru yang berkembang menjadikan studi literatur sebagai salah satu proses dalam metode penelitian kualitatif. Terkait dengan metode analisis studi literatur, peneliti harus mampu menganalisa penelitian yang akan menjadi data yang kemudian akan menggambarkan objek yang diteliti, serta peneliti dapat meneliti dan menjelaskan lebih rinci mengenai masalah pelanggaran HAM PWA tersebut. Sehingga, dalam penyajian dan analisis penelitian ini, penulis menggunakan sumber-sumber pustaka atau literatur yang relevan dengan penelitian yang dibahas, serta dapat menjawab pertanyaan penelitian terkait advokasi UTSS dalam menyelesaikan pelanggaran HAM PWA di Tanzania. Sedangkan pengumpulan data primer

didapat dengan melakukan wawancara terhadap narasumber yang relevan dalam penelitian ini. Dalam hal ini sebagai informan adalah Don Sawatzky selaku *Director of Operations* UTSS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

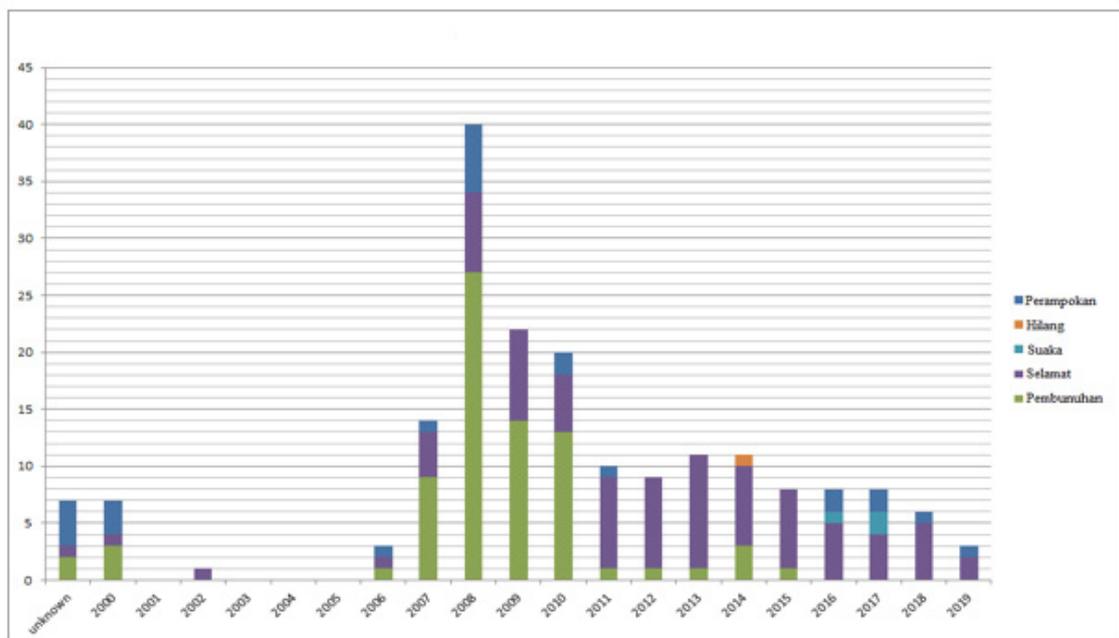
Pelanggaran HAM PWA (People With Albanism) di Tanzania

Praktik budaya Afrika yang telah dipelajari oleh para peneliti dan antropolog pada umumnya belum dapat menyimpulkan awal mula serangan terhadap PWA. Ini mungkin hasil dari banyak faktor, juga karena banyaknya praktik budaya dan etnis di wilayah tersebut serta tidak adanya catatan yang memadai (Under The Same Sun, 2013). Namun di sisi lain, Kromberg, JGR, Zwane, EM dan Jenkins, T. (1987) melakukan penelitian pada albinisme yang dinilai awal mula kasus albino ini berfokus pada sejarah Afrika yang berkaitan dengan cerita, mitos, dan dongeng. Berbagai studi menemukan bahwa sikap dan mitos telah berkembang dan berubah seiring berjalannya waktu. Tabel di bawah ini menunjukkan beberapa mitos yang telah mengakar kuat dan sangat dipercaya di Tanzania, yang kemudian memicu tingginya angka kekerasan dan diskriminasi

terhadap PWA.

Kejahatan, kekerasan, dan diskriminasi yang dialami oleh PWA di Tanzania diiringi dengan kuatnya “*myth*” atau mitos sejak zaman dahulu bahwa *body parts* atau bagian tubuh seorang albino dipercaya dapat membawa keberuntungan dan kekayaan, serta menyembuhkan berbagai penyakit (Salewi, 2011). Mitos tersebut berkembang di kalangan pelaku praktik perdukunan atau dalam bahasa setempat disebut “*waganga*” yang mempengaruhi sebagian orang mengenai keuntungan memiliki jimat yang terbuat dari bagian tubuh seorang albino. Ahli sihir (*waganga*) tersebut kemudian menjadi agen yang ikut memperkuat mitos yang beredar dengan menyebarkan keyakinan bahwa bagian tubuh PWA dapat membawa kekayaan dan kebaikan nasib. Di Tanzania, “set lengkap” bagian tubuh PWA termasuk keempat anggota badan, alat kelamin, telinga, lidah, dan hidung diperkirakan sekitar 2000 hingga 75.000 dolar AS (Under The Same Sun, 2013). Perburuan yang dilakukan untuk membunuh seorang albino semakin meningkat saat pemilihan presiden dan parlemen dimulai. Setiap periode pemilihan, akan membawa siklus pembunuhan baru (Wesangula, 2015). Besarnya

Grafik 1. Serangan Per-Tahun Terhadap PWA (*People With Albinism*) di Tanzania



Sumber: Hasil wawancara melalui *email* dengan Mr. Don (UTSS)

uang yang dikeluarkan untuk membeli bagian tubuh albino, di Afrika, yakni US\$75.000, dapat menimbulkan kecurigaan bahwa para pencari jimat tersebut merupakan kalangan dari pelaku bisnis atau para politisi.

Selain itu, serangan dan pembunuhan terhadap PWA banyak terjadi di wilayah barat laut Tanzania yang merupakan pusat pertambangan dan pelayaran. Tak heran, para pencari jimat dengan potongan tubuh albino ini dilakukan oleh sejumlah orang yang memang sedang mencari kekuatan supranatural yang akan membawa mereka pada keberuntungan serta kekayaan. Dipercaya sebagai pembawa keberuntungan dan kekayaan, warga Tanzania memotong bagian tubuh PWA dan menjualnya di pasar gelap (black market). Untuk satu bagian tubuh tertentu dihargai US\$ 3.000 (sekitar Rp 37 juta) atau US\$ 4.000 (sekitar Rp 49 juta). Untuk seluruh bagian tubuh dijual seharga US\$ 75.000 (sekitar Rp 934 juta). PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) melaporkan, penambang emas di Tanzania memanfaatkan tulang kaum albino sebagai jimat yang dikubur saat mereka menambang emas, dan para nelayan menganyam rambut para albino di jaring mereka dengan harapan mereka dapat menangkap lebih banyak ikan (Saputra, 2015). Di bawah ini data mengenai kekerasan dan penyerangan terhadap PWA di Tanzania.

Grafik 1 memperlihatkan fluktuasi serangan terhadap PWA yang terjadi sejak tahun 2000 bahkan tahun-tahun sebelumnya. Serangan tersebut memuncak di tahun 2008 dengan data paling banyak berupa korban pembunuhan. Maraknya tindak kejahatan terhadap PWA di Tanzania kemudian diliput oleh harian berita internasional BBC yang akhirnya menjadi perhatian dunia internasional hingga terbentuknya INGO UTSS untuk mengatasi masalah tersebut serta memperjuangkan hak PWA dari tindakan kejahatan maupun diskriminasi.

Peristiwa di Afrika terkait masalah albino pada umumnya terjadi karena ketidakpahaman kebanyakan orang yang membuat masyarakat Afrika termasuk Tanzania menjadi kurang terbuka atas bahayanya melakukan tindakan kejahatan terhadap manusia yang berakibat

pada pelanggaran HAM. Terlebih pengaruh kuat mitos dan budaya serta pandangan buruk tentang orang-orang albino yang telah mendarah daging pada masyarakat Tanzania, terlepas dari agama dan kepercayaan mereka. Hal tersebut menjadi sumber utama terjadinya diskriminasi dan kekerasan terhadap PWA. Meskipun faktanya di Afrika sendiri telah memiliki aturan yang dicantumkan dalam Piagam Afrika yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia dan Masyarakat tahun 1981-1986. Pada Pasal 2 Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Masyarakat telah diatur mengenai perlindungan hak asasi manusia untuk orang-orang di Afrika termasuk PWA. Namun aturan tersebut belum mampu diimplementasikan dengan baik oleh negara-negara Afrika, khususnya Tanzania. Sebagai salah satu negara termiskin di dunia, Tanzania masih bergelut dengan pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi negaranya, sehingga isu mengenai pelanggaran HAM atau perlindungan orang-orang minoritas dan marginal seperti PWA belum diprioritaskan. Belum memadainya aturan dan kurang kuatnya komitmen dari pemerintah Tanzania dalam menangani masalah pelanggaran HAM PWA kemudian memicu berdirinya INGO UTSS untuk mengambil tempat memperjuangkan isu ini ke tingkat global, UTSS kemudian masuk dan mendirikan cabangnya di Tanzania pada tahun 2009.

Advokasi UTSS terhadap Pelanggaran HAM PWA

Upaya yang dilakukan UTSS sebagai INGO untuk mengakhiri pelanggaran HAM yang marak terjadi di Afrika khususnya Tanzania ini berawal dari kekecewaan terhadap pemerintahan Tanzania yang tidak mengambil tindakan serius terhadap kejahatan yang menimpa warga negaranya. Eksistensi PWA di Tanzania sebagai kelompok minoritas semakin terancam ketika menyebarnya mitos-mitos yang menjadi penyebab tindakan kejahatan, kekerasan, dan diskriminasi terhadap PWA. Hal ini menuntut UTSS untuk ikut serta dalam menyelesaikan masalah pelanggaran HAM yang menimpa PWA dan memperjuangkan hak hidup mereka, dengan cara melakukan advokasi

secara global.

Advokasi merupakan salah satu upaya UTSS untuk menghapus kejahatan, kekerasan, dan diskriminasi terhadap PWA. Secara internal UTSS melakukan advokasi dimulai dari mendidik dan mengajarkan pemahaman dasar mengenai fakta albino ke komunitas kecil atau local di wilayah Tanzania. UTSS memiliki pesan yang sama dalam menjalankan advokasinya, yaitu orang dengan albinisme sama seperti orang lain dengan dua perbedaan sederhana; pertama penglihatan rendah dan kedua perbedaan warna kulit, rambut, dan mata akibat dari kurangnya pigmen melanin. Namun terlepas dari perbedaan yang dialami PWA, mereka berhak atas hak dan peluang yang sama dengan setiap orang (Under The Same Sun, n.d.).

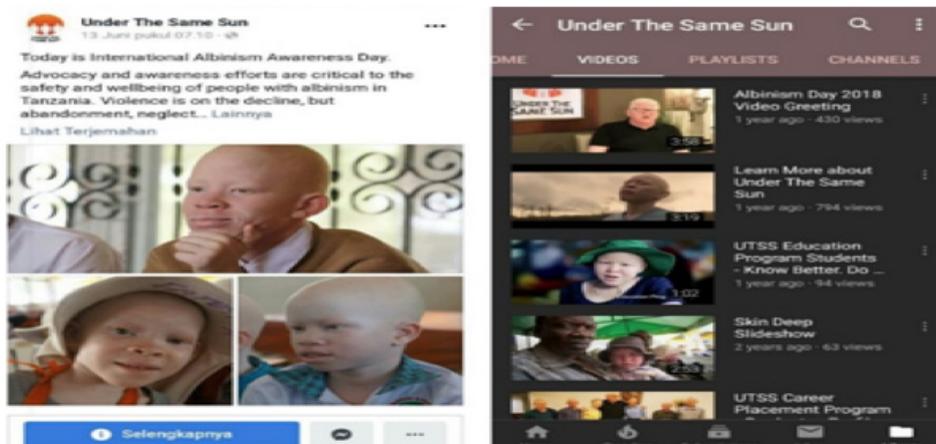
Don Sawatzky selaku *Director of Operations* UTSS menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan UTSS secara internal di Tanzania adalah melalui advokasi dengan cara mendidik seluruh masyarakat Tanzania tentang albinisme melalui seminar, memberikan pemahaman albinisme ke tempat-tempat umum melalui televisi, radio, makalah berita, media sosial, dan lain sebagainya. Menurutnya, seminar dilakukan baik di wilayah perkotaan ataupun di pedesaan terutama di universitas, rumah sakit dan kantor pemerintah, juga ke sekolah-sekolah, gereja, dan rumah tangga tempat peristiwa kekerasan terjadi. Selanjutnya, UTSS dengan melakukan strategi

Global campaign yang menarget masyarakat global dan organisasi internasional, agar menarik perhatian mereka untuk melihat isu PWA di Tanzania. Institusi internasional PBB merupakan target utama UTSS dsalam mengadvokasi PWA, karena PBB mampu mengeluarkan kebijakan yang mengikat negara-negara untuk melindungi kelompok minoritas seperti PWA.

Untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat global, UTSS aktif melakukan kampanye global lewat media, seperti membuat catatan atau filem dokumenter tentang tindak kejahatan terhadap PWA. Selain itu, UTSS aktif melakukan kampanye lewat media sosial *facebook* dan *youtube*. Kemajuan teknologi informasi saat ini mempermudah kerja advokasi INGO dalam menyebarkan isu yang diperjuangkan, terutama lewat media baru seperti media sosial yang penggunaanya aktif secara *realtime* dalam mengakses dan menerima berbagai informasi. Isu mengenai kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap PWA di Tanzania dapat tersalurkan dengan baik melalui akun-akun media sosial milik UTSS. Media sosial juga menjadi alat UTSS untuk mengajak masyarakat internasional agar mendukung segala upaya dalam mengakhiri segala bentuk pelanggaran HAM berupa kejahatan, kekerasan, dan diskriminasi terhadap PWA di Tanzania bahkan dunia.

Gambar 5.3 merupakan *screenshoot* akun-akun media sosial resmi UTSS berupa

Gambar 5.3 Kampanye Global oleh UTSS melalui Media Sosial Facebook dan Youtube



Sumber: Screenshoot dari facebook.com/underthesamesun/dan youtube.com/user/underthesamesunfund

facebook dan *youtube*. Kedua media sosial tersebut dijadikan UTSS untuk menyalurkan upaya kampanye media yang dilakukan sebagai INGO. Seperti kebanyakan akun media sosial lainnya, UTSS mencantumkan biografi berupa profil singkat serta visi organisasi. Melalui akun *facebook*, UTSS memang lebih aktif membagikan *content* dalam bentuk kegiatan-kegiatan seperti advokasi, edukasi, hingga seminar. Di lain akun *youtube*, UTSS membagikan video-video berupa wawancara sang *founder* dan CEO UTSS yakni Peter Ash dengan media berita, beberapa video lain juga diunggah mengenai sejarah PWA serta video berupa dokumenter tentang kehidupan PWA di Tanzania. Akun *facebook* memiliki jumlah peminat akun sebanyak 18.948 ribu orang, sementara untuk akun *youtube* mencapai 345 *subscribers* atau pengikut.

Advokasi UTSS lewat kampanye global yang menarget PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dilakukan dengan cara terlibat aktif melakukan kampanye dalam forum-forum maupun lembaga PBB. Berikut hasil dari jaringan advokasi yang dibangun UTSS dengan PBB sejak tahun 2009 :

1. UTSS memiliki status LSM penuh di PBB dan membuat presentasi rutin kepada komite-komite Amerika Serikat;
2. Amerika Serikat telah mengeluarkan 5 Resolusi Dewan Hak Asasi Manusia dan Uni Afrika mengadopsi, sebagai hasil dari advokasi UTSS;
3. Diperingatinya Hari Kesadaran Albinisme Internasional pada 13 Juni oleh PBB tahun 2015;
4. Sejak 2016, AS telah menciptakan posisi Pakar Independen tentang Albinisme di PBB;
5. UTSS adalah sumber utama untuk menerbitkan data internasional tentang pelanggaran HAM terhadap orang-orang dengan albinisme. Data ini digunakan oleh PBB, UNICEF dan banyak lainnya;
6. Pada 2015, UTSS menjadi penyelenggara Konferensi Albinisme Pan-Afrika ke-1 dengan 38 negara dan lebih dari 200 delegasi berpartisipasi;
7. UTSS secara teratur menerima liputan media internasional, dan telah membuat banyak

film, dokumenter, dan buku tentang isu-isu seputar albinisme di Afrika (Under The Same Sun, n.d.).

Beberapa keberhasilan UTSS di atas memperlihatkan upaya advokasi yang dilakukan UTSS cukup efektif dalam mengangkat harkat dan martabat PWA secara global. PWA diakui eksistensi dan haknya sebagaimana manusia pada umumnya. Hal ini berdampak positif terhadap kehidupan minoritas PWA yang menjadi lebih baik, sebagaimana program edukasi yang dibangun oleh UTSS di Tanzania, dimana kelompok minoritas PWA dapat mengakses pendidikan dengan baik dan setara dengan masyarakat umum lainnya. Hal ini sejalan dengan advokasi internal yang dilakukan UTSS di Tanzania lewat kegiatan seminar di berbagai tempat untuk mengubah persepsi buruk masyarakat tentang PWA. Akibatnya, mereka menjadi lebih terbuka dan tereduksi terhadap eksistensi PWA maupun terhadap hak PWA untuk dapat hidup berdampingan, mendapatkan akses yang sama terhadap sumber daya ekonomi dan pendidikan.

Secara global advokasi UTSS dapat dikatakan berhasil dalam mendorong PBB mengeluarkan kebijakan-kebijakan penting terkait pengakuan dan perlindungan hak orang-orang albino. Namun, di Tanzania sendiri perjuangan advokasi UTSS masih perlu ditingkatkan, terutama upaya membangun kesadaran dan mengubah pandangan masyarakat luas terhadap PWA yang masih dipengaruhi oleh mitos mengenai PWA yang sudah membudaya dalam kehidupan masyarakat Tanzania. Hal penting lainnya yaitu kondisi penegakan hukum pemerintah Tanzania yang belum kuat dalam mengangani para pelaku tindakan kekerasan terhadap PWA, seperti pelaku bisnis maupun elit politik, dinilai menjadi hambatan terbesar dalam menyelesaikan berbagai kasus kekerasan dan kriminalitas tersebut. Hal ini terlihat dari masih sedikitnya pelaku yang ditangkap dan diadili, meskipun jumlah kejahatan/serangan terhadap PWA menurun di tahun 2015. Masyarakat dapat menambah pengetahuan mengenai PWA, tetapi di sisi lain ada hukum yang berlaku namun tidak diterapkan untuk melindungi kehidupan dan semua hak PWA, maka hal ini menjadi sia-

sia. Oleh karena itu, UTSS sebagai INGO juga menginginkan adanya peran pemerintah yang harus bertanggungjawab penuh atas kehidupan PWA.

Berdasarkan teori liberalisme institusional dikatakan bahwa, sebuah institusi internasional sangat berperan dalam mewujudkan dan memajukan kerjasama demi tercapainya kepentingan bersama. UTSS telah menjalankan kerjasama dengan membangun jejaring bersama PBB, melakukan advokasi dan kampanye global untuk mengatasi masalah kekerasan dan diskriminasi PWA di Tanzania. UTSS menyebarkan informasi mengenai pelanggaran HAM PWA untuk mendapatkan dukungan internasional dalam penyelesaian kasus tersebut. UTSS memiliki komitmen dalam melindungi dan menghormati Hak Asasi Manusia, terutama HAM PWA di Tanzania. Liberalisme institusional telah terbukti relevan dengan penelitian ini terkait pelanggaran HAM PWA di Tanzania, di mana aktor dalam hubungan internasional bukan hanya negara melainkan ada organisasi internasional yang juga dapat mewujudkan kerjasama dan memberikan manfaat yang nyata.

SIMPULAN

UTSS sebagai organisasi internasional non-pemerintah telah melakukan perannya sebagai INGO dengan memberikan informasi dan dukungan, serta strategi yang terbukti cukup berhasil dan sesuai dengan tujuannya. Melihat masalah kekerasan dan diskriminasi PWA di Tanzania yang terus meningkat, UTSS melakukan upaya advokasi dan kampanye global untuk memperjuangkan HAM PWA. UTSS melakukan advokasi secara internal di Tanzania lewat rangkaian kegiatan seminar dan edukasi untuk memberikan informasi yang jelas pada masyarakat Tanzania bahwa keadaan kelompok minoritas PWA yang berbeda secara fisik dengan mereka bukanlah bentuk kutukan atau sihir sebagaimana mitos yang berkembang dan membudaya dalam kehidupan masyarakat Tanzania. Selain itu, UTSS juga berhasil membuka akses pendidikan khusus bagi anak-anak albinism yang selama ini sulit mereka dapatkan. Secara global UTSS berjuang

lewat kampanye global dengan membangun jaringan bersama organisasi internasional PBB hingga berhasil mendorong PBB mengeluarkan beberapa kebijakan yang mengakui eksistensi dan perlindungan HAM PWA. UTSS juga berhasil membawa isu pelanggaran HAM PWA ini ke ranah global yakni lewat kampanye global melalui media sosial, sehingga masyarakat global mengetahui mengenai isu tersebut, bahkan ikut memberikan dukungan terhadap perjuangan HAM PWA yang dilakukan oleh UTSS.

DAFTAR PUSTAKA

- Adebayo Fayoyin.(2014) Advokasi Untuk Minoritas di Afrika: Masalah dan Pelajaran dalam Meningkatkan Hak Albinos di Tanzania dan Osus di Nigeria. *Jurnal Penelitian Asia Pasifik*. vol: I. Edisi XVII *Africa Charter on Human and Peoples Rights*.
- Africa, Super For Analys and Research in. (2016). *An Introduction to Advocacy: Training Guide*. Washington DC
- African Union.(2017) *Diburu dan Dibunuh, Inilah Kisah Mengharukan Orang Albino di Tanzania*. Diakses melalui <http://www.african-union.org/diburu-dan-dibunuh-inilah-kisah-mengharukan-orang-albino-di-afrika/Aljazeera>. (2019). *What Is Albinism and What Causes it?*. Diakses melalui <https://www.aljazeera.com/indepth/interactive/2017/04/albinism-170424053209871.html>
- Bakry, Umar Suryadi. 2016. *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Budi Irdiyawan. (2017). *Program advocacy and public awareness oleh UTSS sebagai bentuk perlindungan HAM orang-orang dengan albinisme di Tanzania*. Diakses melalui <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://scholar.unand.ac.id/28467/2/>
- D, Korten. (1987). Third Generation NGO Strategies: a Key to People Centered Development. *World Development*, Vol. 15, Supplement Deklarasi Universal

- Hak Asasi Manusia Majelis Umum PBB tanggal 10 Desember 1948
- Diah Ayu Vivit Nurfa'idah. (2017). Kurangnya Komitmen Negara dan Organisasi Internasional Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Albino di Tanzania. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*. Vol 6. No. 1
- Folia, Rosa. (2017). *Ilmu Sihir Akan Di Bahas Di PBB*. Diakses melalui <https://www.idntimes.com/news/world/rosa-folia/pbb-akan-bahas-soal-ilmu-sihir-1/full> https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/03/150312_tanzania_albino
- Global Campaign for Peace Education. (2019). *Campaign Statement & Campaign Goals*. Diakses melalui <https://www.peace-ed-campaign.org/>
- Hass, Michael dalam James N. Rosenau. (1969). *International Politics and Foreign Policy: A Reader in Research and Theory*. New York: The Free Press
- Hildy Teegen, Jonathan P. Doh dan Sushil Vachani. (2004). *Journal of International Business Studies*. Vol. 35, No.6 Diterbitkan oleh: Palgrave Macmillan Journals
- Jeffrey Unerman, Brendan O'Dwyer. (2006). Theorising accountability for NGO Advocacy. *Accounting, Auditing, & Accountability Journal*, Vol. 19 Issue: 3
- Kisanga, Peter. (2017). *Impact of interventions of the murder of People With Albinism in Victoria Lake a case of Shinyanga region*. Diakses melalui <http://journals.udsm.ac.tz/index.php/jgat/article/download/687/668>
- Kementerian Luar Negeri RI. (2016). Profil Negara Tanzania. Diakses melalui <https://www.kemlu.go.id/daressalaam/id/Pages/TAN.aspx>
- Le Roy A, Bennet. (1997). *International Organizations: Principles and Issues*. New Jersey: Prentice Hall Inc
- Methusela Mihsael Masanja dan Kija Steven Magembe. (2015). *Power Of Stigma Against Households' Efforts To Maintain Households' Wellbeing Among Households With Albinos In Tanzania*. Vol 3. No. 11
- Masanja, Methusela M., et al. (2014). Awareness, Attitude and Level of Albino's Predicament in Tanzania. *In Asian Journal of Applied Science and Engineering*
- Mas'oed, Mohtar. (1990). *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES
- National Geographic. (2015). *Warga Albino di Tanzania Kerap Dibunuh Menggunakan Sihir*. Diakses Melalui <http://nationalgeographic.co.id/berita/2015/01/warga-albino-di-tanzania-kerap-dibunuh-menggunakan-sihir>
- Office of the United Nations High Commissioner Human Rights. (2019) *Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia*. Diakses melalui https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/inz.pdf&ved=2ahUKEwiAiKKIv7bhAh
- Perwita, A. A., & Yani, Y. M. (2005). *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Pettiford, Jill Steans & Lloyd. (2009). *Hubungan Internasional Perspektif dan Tema*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Repository Universitas Gajah Mada. (2017). Diakses melalui <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://etd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/132795/potongan/S1-2017-345279-introduction.pdf&ved=2ahUKEwjy-vn24NvgAhXSinAKHSzuC0cQFjABegQIBxAB&usq=AOvVaw37yf4eQj7oUTiYkQLf9gjb>
- Salewi, Diana Henry. (2011). *The Killing of Persons with albinism in Tanzania: A Social-legal inquiry*. Diakses melalui [https://repository.up.ac.za/bitstream/handle/2263/18645/Salewi_Killing\(2011\).pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repository.up.ac.za/bitstream/handle/2263/18645/Salewi_Killing(2011).pdf?sequence=1&isAllowed=y)

- Saputra, Eka Yudha. (2015). *Tubuh Manusia Albino Diperdagangkan Di Tanzania*. Diakses melalui <https://www.google.com/amp/s/dunia.tempo.co/amp/637990/tubuh-manusia-albino-diperdagangkan-di-tanzania>
- Sikkink, ME Keck & K. (1999). *Transnational Advocacy Networks In International And Regional Politics*. Ithaca, UK: Blackwell Publisher
- Sorensen, Robert Jackson and Georg. (1999). *Introduction to International Relations*, Oxford.
- Trial International. (2018). *Crimes Against Humanity*. Diakses melalui <https://trialinternational.org/topics-post/crimes-against-humanity/>
- Under The Same Sun. (2013). UTSS Report, 'Children with Albinism: Violence & Displacement'. NGO: Under The Same Sun. Canada
- UN Human Rights. (2015). *Albinism Awareness Campaign - Peter Ash*. Diakses melalui <https://youtu.be/Jca7Vqjj1Al>
- United Nations. (2018). *Crimes Against Humanity*. Diakses melalui https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.un.org/en/genocideprevention/crimes-against-humanity.html&ved=2ahUKEwjW7vjrovaAhXMuo8KHS09BQQQFjAYegQICRAB&usg=AOvVaw0XAPj3YG_SmYwgWqMblk-D
- Under The Same Sun. (2014). *Adoption of International Albinism Day by UNHRC*. Diakses melalui <https://youtu.be/S3-PXVL5ZtU>
- _____. (2014). *UTSS Tanzania Works with Tanzania's Director of Public Prosecutions*. Diakses melalui <https://youtu.be/xx5UI7jqh4A>
- Winarno, Budi. (2014). *Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer; Cet. 1*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service)
- Wesangula, Daniel. (2015). *Albino di Tanzania Takut Mati Ketika Dekat Waktu Pemilihan Dilakukan*. Diakses melalui <https://mg.co.za/article/2015-05-14-albinos-in-tanzania-fear-death-as-polls-near>
- Wawancara Mr. Don Sawarzky selaku *director of operations* UTSS melalui *email*